BAB III

**URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN**

**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

1. **URUSAN KONKUREN**
	* 1. **RINGKASAN URUSAN WAJIB**
2. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN**
3. **OPD Pelaksana**

OPD Pelaksana pada urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. **Program dan Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan di Kabupaten Temanggung tahun 2018 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. *Program Pelayanan Administrasi*, meliputi kegiatan:
	* + - 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
				2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
				3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
				4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
				5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
				6. Penyediaan alat tulis kantor;
				7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
				8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
				9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
				10. Penyediaan makanan dan minuman;
				11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
				12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2. *Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,* meliputi kegiatan:
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
4. Pengadaan peralatan gedung kantor;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. *Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur* meliputi kegiatan:
7. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
8. *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,* meliputi kegiatan:
9. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP-SPAMS;
10. Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa;
11. Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706;
12. Fasilitasi Pendamping Desa;
13. Fasilitasi Kelembagaan BKAD;
14. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
15. Pemberdayaan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
16. Penyusunan dan Sosialisasi Perbub tentang pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
17. Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa;
18. Pembinaan Adat Istiadat;
19. Monitoring dan Evaluasi TTG dan kegiatan krenova;
20. Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD.
21. *Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,* meliputi kegiatan :
22. Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka ketahanan pangan;
23. Bintek Manajemen BUMDes dan BUMADES.
24. *Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan,* meliputi kegiatan :
25. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
26. Bulan Bhakti Gotong Royong;
27. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa;
28. Fasilitasi Dana Transfer ke Desa;
29. Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
30. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/ Kelurahan;
31. Fasilitasi Iplementasi UU Desa.
32. *Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan,* meliputi kegiatan :
33. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
34. Pendataan Awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan.
35. *Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa,* meliputi kegiatan :
36. Penguatan keuangan desa;
37. Pengembangan sisten informasi desa (Ban-Keu).
38. **Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pemberdayaan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

| **NO** | **INDIKATOR SPM** | **CAPAIAN 2018** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | **NIHIL** |  |  |
|  |
| 2 |  |  |  |
|  |
| 3 |  |  |  |
|  |

Adapun data indikator kinerja sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan secara umum tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut:

1. *Program Pelayanan Administrasi, meliputi kegiatan :*
	* + - 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersediannya dana komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa meningkatnya kenyamanan kerja dan kecepatan tugas bagi 31 pegawai selama 12 bulan;
				2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan
				3. capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor berupa peningkatan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan;
				4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua, berupa peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan;
				5. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja terciptanya kebersihan kebersihan kantor yang berupa peningkatan kenyamanan kerja selama 12 bulan;
				6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan capaian kerja terpeliharanya peralatan kantor yang berupa peningkatan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaantugas selama 12 bulan;
				7. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor berupa peningkatan pelaksanaan tugas selama 12 bulan;
				8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan dan penggandaan yang berupa peningkatan kenyamanan kerja dan kecepatan pelaksanaan tugas selama 12 bulan;
				9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan koran, majalan dan perundang-undangan yang berupa peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan;
				10. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman yang berupa peningkatan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan;
				11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa peningkatan kelencaran tugas luar daerah selama 12 bulan;
				12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya distribusi surat-surat ke dalam daerah, kurir ke kecamatan dan desa selama 12 bulan;

*2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi kegiatan:*

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tersedianya perlengkapan gedung kantor yang berupa pengadaan vacum cleaner 3 buah, Lap top 1 unit, printer 3 buah, scaner 1 buah, karpet 1 unit, handycam 1 buah, Mikro SD Sandisk 32 GB 1 buah, Treepod screen santa ST 6958 1 buah, dan peralatan studio antara lain dry cabinet, red head lamp, ligh stang, kabel serta brica invra 5 alpha drone guna peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur;

# b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tersedianya peralatan gedung kantor yang berupa filling kabinet 1 buah, rak arsip 6 buah, bendera merah putih 1 unit, kelengkapan komputer seperti flash disk, mouse, hard disk, dispenser 3 buah, peralatan dapur, gordyn guna kelancarana pelaksanaan tugas;

# c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya bangunan gedung kantor yang nyaman untuk bekerja (pengecatan gedung, rehab ruang kepala dinas dll).

*3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan:*

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja berupa pembelian pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya untuk peningkatan disiplin aparatur sebanyak 31 karyawan

*4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, meliputi kegiatan:*

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP-SPAMS dengan capaian kinerja terselenggaranya monitoring BP-SPAMS bagi 107 desa dari 20 kecamatan, evaluasi, rapat koordinasi Asosiasi BP-SPAMS dan pelatihan administrasi bagi pengelola BP-SPAMS;

Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa dengan capaian kinerja tersedianya prasarana jalan dan terbangunnya jalan rabat beton di 3 desa yaitu desa Mergowati Kecamatan Kedu, Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan dan Desa Glapansari Kecamatan Parakan;

Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan di 2 desa desa;

Fasilitasi Pendamping Desa capaian kinerja terfasilitasinya koordinasi pendamping desa bagi 60 orang;

Fasilitasi Kelembagaan BKAD dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi kelembagaan Badan Koordinasi Antar Desa berupa rapat koordinasi, Musyawarah Antar Desa Evaluasi tengah tahun dan MAD pertanggungjawaban dan Perencanaan, Rakor kelembagaan, pelatihan kelembagaan BKAD monitoring, evaluasi kelembagaan BKAD, fasilitasi pelaksanaan musyawarah antar desa, fasilitasi penanganan masalah di 18 kecamatan;

Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis bagi Lembaga Ekonomi Desa sejumlah 20 BUMDes, Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 di 20 desa dan terlaksananya monitoring dan evaluasi di 60 LED;

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan capaian kinerja terwujudnya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan;

Penyusunan dan Sosialisasi Perbub tentang pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penyusunan perbub tentang pedoman administrasi LKD dan sosialisasi 20 kecamatan;

Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten dan desa, bimbingan teknis tim fasilitasi, di 266 desa;

Pembinaan Adat Istiadat capaian kinerja terlaksananya sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dengan melalui pembentukan kelompok masyarakat pelestari dan pengembangan adat istiadat di 20 Kecamatan;

Monitoring dan Evaluasi TTG dan kegiatan krenova dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi penerapan dan pengembangan TTG dan Implementasi TTG guna terselenggaranya sebagai peserta Gelar TTG tingkat Nasional, 30 orang di 5 kecamatan;

Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD dengan capaian kinerja berupa terlaksananya bimbingan teknis bagi 60 orang pengurus LPMD.

*5) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, meliputi kegiatan :*

* + 1. Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka ketahanan pangan dengan capaian kinerja terlaksananya identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa dan Lumbung Desa, terlaksananya sosialisasi permendagri no 30 tahun 2008 tentang CPPD bagi 80 orang;
		2. Bintek Manajemen BUMDes dan BUMADES dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis manajemen BUMDes bagi 40 BUMDes sejumlah 105 orang;

*6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, meliputi kegiatan :*

a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis SIP posyandu, terlaksananya pengisian dan penghitungan strata posyandu, teridentifikasinya posyandu yang dapat dikembangkan menjadi posyandu model di 289 desa/kelurahan;

b. Bulan Bhakti Gotong Royong dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat / BBGRM dan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK guna terwujudnya kegiatan gotong royong masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat, terwujudnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan desa/kelurahan di 289 desa/kelurahan dan 1 desa lokasi pencanangan;

c. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan capaian kinerja terlaksananya pembinaan, monitoring Musrenbang RKP Desa di 266 desa;

d. Fasilitasi Dana Transfer ke Desa dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi berupa penyusunan perbub, sosialisasi dana transfer serta penjelasan teknis administrasi pengelolaan dana transfer di 266 desa;

e. Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa di 266 desa;

f. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/ Kelurahan dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi mulai dari penyusunan proposal, permohonan pencairan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban, sosialisasi bantuan Gubernur kepada desa di 266;

g. Fasilitasi Implementasi UU Desa dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan bagi pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebanyak 266 orang;

*7) Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan, meliputi kegiatan :*

 a. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dengan capaian kinerja terlaksananya lomba desa/kelurahan guna terwujudnya peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat masyarakat, semangat masyarakat, kesiapan administrasi dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis gender di 6 desa/kelurahan ;

 b. Pendataan Awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan dengan capaian kinerja terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat semangat asyarakat, kesiapan administrasi dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis Gender di 20 desa binaan.

*8) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, meliputi kegiatan :*

Penguatan keuangan desa dengan capaian kinerja terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa di 266 desa;

Pengembangan sisten informasi desa (Ban-Keu) dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan Sistem Informasi Desa sebanyak 344 orang tenaga operator di 172 desa.

1. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Tahun 2018

| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH PEGAWAI** | **KET** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kondisi pegawai berdasarkan: |   |   |
| 1 | Kualisasi Pendidikan |   |   |
|  | a. | SD | 1 |   |
|  | b. | SMP | 1 |   |
|  | c. | SMA | 5 |   |
|  | d. | Sarjana Muda (D-III) | 3 |   |
|  | e. | S-1 dan D-IV | 10 |   |
|  | f. | S-2 | 5 |   |
| **Jumlah** | **25** |   |  |
| 2 | Pangkat/Golongan |  |   |
|  | a | Gol I | 1 |   |
|  | b | Gol II | 9 |   |
|  | c | Gol III | 9 |   |
|  | d | Gol IV | 6 |   |
| **Jumlah** | **25** |   |
| 3 | Jabatan |  |   |
|  | a | Eselon II | 1 |  |
|  | b | Eselon III | 3 |  |
|  | c | Eselon IV | 6 |  |
|  | d | Eselon V | 0 |  |
|  | e | Jabatan Fungsional Khusus | 0 |  |
|  | f | Jabatan Fungsional Umum | 0 |  |
| **Jumlah** | **10** |  |
| **JUMLAH** | **25** |  |

 Keterangan:

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pemberdayaan,

Pangkat dan Golongan sampai dengan kondisi bulan Desember sejumlah 25 orang, karena ada beberapa pegawai yang pensiun.

1. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tahun 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***1*** | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | ***262.200.000*** | ***251.031.027*** | ***95,74*** |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 15.000.000 | 13.845.165 | 92,30 |
|  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 5.000.000 | 4.146.000 | 82,92 |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 50.000.000 | 48.743.375 | 97,49 |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 21.000.000 | 19.824.237 | 94,40 |
|  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 5.000.000 | 1.643.000 | 32,86 |
|  | Penyediaan alat tulis kantor | 16.000.000 | 15.997.500 | 99,98 |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.500.000 | 7.486.800 | 99,82 |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.700.000 | 2.200.000 | 81,48 |
|  | Penyediaan makanan dan minuman | 16.000.000 | 14.729.400 | 92,06 |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 110.000.000 | 109.844.700 | 99,86 |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 7.000.000 | 5.569.850 | 79,57 |
| ***2*** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | ***115.000.000*** | ***114.811.700*** | ***99,84*** |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 50.000.000 | 49.840.000 | 99,68 |
| b. | Pengadaan peralatan gedung kantor | 25.000.000 | 24.971.700 | 99,89 |
| c. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
| ***3*** | ***Program Peningkatan Disiplin Aparatur*** | ***8.250.000*** | ***7.750.000*** | ***93,94*** |
|  | Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya | 8.250.000 | 7.750.000 | 93,94 |
| ***4*** | ***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*** | ***1.101.472.000*** | ***1.067.894.023*** | ***96,95*** |
|  | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP-SPAMS | 23.830.000 | 23.800.000 | 99,87 |
| b. | Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa | 89.320.000 | 86.045.000 | 96,33 |
| c. | Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 | 45.000.000 | 43.785.000 | 97,30 |
| d. | Fasilitasi Pendamping Desa | 46.700.000 | 46.700.000 | 100,00 |
| e. | Fasilitasi Kelembagaan BKAD | 47.800.000 | 47.673.400 | 99,74 |
| f. | Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa | 50.260.000 | 49.268.000 | 98,03 |
| g. | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 398.500.000 | 395.606.000 | 99,27 |
| h. | Penyusunan dan Sosialisasi Perbub tentang pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan | 23.065.000 | 22.344.000 | 96,87 |
| i. | Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa | 262.567.000 | 247.626.123 | 94,31 |
| j. | Pembinaan Adat Istiadat | 19.430.000 | 16.378.500 | 84,29 |
| k. | Monitoring dan Evaluasi TTG dan kegiatan krenova | 75.000.000 | 70.917.000 | 94,56 |
| l. | Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD | 20.000.000 | 17.750.000 | 88,75 |
| ***5*** | ***Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan*** | ***70.805.000*** | ***63.478.000*** | ***89,65*** |
| a. | Fasilitasi Lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) dan lumbung desa dalam rangka ketahanan pangan | 14.400.000 | 13.399.000 | 93.05 |
| b. | Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES | 56.405.000 | 50.079.000 | 88,78 |
| ***6*** | ***Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangung desa/kelurahan*** | ***428.119.000*** | ***408.357.040*** | ***95,38*** |
|  | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | 73.530.000 | 70.308.000 | 95,62 |
| b. | Bulan Bhakti Gotong Royong | 38.635.000 | 36.850.000 | 95,38 |
| c. | Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa | 15.000.000 | 13.184.000 | 87,89 |
| d. | Fasilitasi Dana Transfer ke Desa | 160.500.000 | 154.166.040 | 96,05 |
| e. | Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa | 22.344.000 | 18.871.000 | 84.46 |
| f. | Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/ Kelurahan | 58.110.000 | 56.358.000 | 96,99 |
| g. | Fasilitasi Iplementasi UU Desa | 60.000.000 | 58.620.000 | 97,70 |
| ***7*** | ***Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan*** | ***199.550.000*** | ***195.903.000*** | ***98,17*** |
|  | Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan | 150.000.000 | 149.872.000 | 99,91 |
| b. | Pendataan Awal, Pembinaan, Evaluasi, Desa Pembinaan | 49.550.000 | 46.031.000 | 92,90 |
| ***8*** | ***Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*** | ***86.265.000*** | ***79.082.000*** | ***91,67*** |
|  | Penguatan Keuangan Desa | 23.475.000 | 18.662.000 | 79.50 |
| b. | Pengembangan Sistem Informasi Desa ( Ban-Keu) | 62.790.000 | 60.420.000 | 96,23 |

1. **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah daerah pada urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana pada tahapan perencanaan ini telah dipilah usulan-usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam APBD Kabupaten pada tahun anggaran berikutnya, dibahas dalam forum Perangkat Daerah guna dilakukan sinkronisasi dan atau integrasi perencanaan *top down* dan *bottom up*. Hasil sinkronisasi dan integrasi tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Renja Perangkat Daerah tersebut akan disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dibahas dan disusun dalam forum Musrenbang Kabupaten.

RKPD inilah yang akan menjadi bahan awal penyusunan RAPBD, setelah melalui proses penajaman pada penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD sebagai bahan RAPBD.

1. **Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan ini didukung dengan kondisi sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 5.3

Sarana dan Prasarana

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Kabupaten Temanggung Tahun 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS SARPRAS** | **JUMLAH** | **SATUAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. | Tanah | 2 | Bidang | Baik/Cukup/Rusak |
| b. | Gedung | 2 | Gedung | Baik/Cukup/Rusak |
| c. | Alat-alat angkutan | 25 | Buah | Baik/Cukup/Rusak |
| d. | Alat-alat perkantoran | 253 | Buah | Baik/Cukup/Rusak |

Sarpras lainnya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS SARPRAS** | **JUMLAH** | **SATUAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. | Jaringan | 2 | Unit | Baik/Cukup/Rusak |
| b. |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |

1. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan adalah:

* + - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini menyebabkan belum siapnya aparatur pemerintah desa untuk mengelola dana yang cukup besar, juga pengembangan penggunaan Ilmu Teknologi seperti Aplikasi, Website dll.
			2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu:
				1. Masih rendahnya pelayanan aparatur pemerintahan desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
				2. Masih minimnya kualitas aparatur pemerintah desa;
				3. Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan desa;
				4. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
				5. Masih perlunya kerangka regulasi tentang pemerintah desa;
				6. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBdesa sebagai daya dukung pembangunan desa.
			3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar desa, rental, pengembangan pariwisata skala desa, namun belum semua desa melaksanakan secara optimal;
			4. Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan masyarakat;
			5. Belum ada sinkronisasi antar OPD di tingkat kabupaten dalam melakukan pendampingan kepada desa karena belum ada yang mengatur hal tersebut

**Adapun solusi yang dilakukan adalah:**

1) Melakukan fasilitasi guna peningkatan kualitas SDM aparatur desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi;

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan melakukan pembinaan dan pelatihan perangkat pemerintah desa mengenai menejemen dan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Melakukan pendataan kelembagaan ekonomi desa seperti pasar desa, BUMDesa, Usaha Kecil Menengah. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha ekonomi desa untuk meningkatkan kemampuannya, serta memberikan bantuan modal dan peralatan serta upaya peningkatan kreativitas dan inovasi yang ada di desa dalam rangka pengembangan pariwisata yang ada di desa
3. Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang pembangunan dan melibatkan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan di desa, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bagi desa yang berimplikasi pada percepatan pembangunan dan pembangunan yang tepat sasaran, meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk dapat menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri melalui inovasi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatn dan pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara partisipatif.
4. Meningkatkan sinkronisasi antar OPD mulai dari perencanaan, penganggaran, pendampingan serta evaluasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan melalui invonasi yang dapat mewujudkan desa mandiri, meningkatkan kualitas pelayanan public OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga program dan kegiatan akan fokus dan dapat memunculkan program unggulan daerah.

**Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

1. Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah ( Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak);

KEPALA DINPERMADES

 KABUPATEN TEMANGGUNG

 **AGUS SARWONO,S.Sos,MM**

 Pembina Utama Muda

 NIP. 196604111986071001